

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan kebijakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan. Pendekatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi dalam melaksanakan pembangunan dan melayani masyarakat.

6.1 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan selanjutnya dijabarkan dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Hal ini dilakukan agar pembangunan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Rumusan strategi menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai Prioritas Pembangunan jangka Menengah.

Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang antara lain :

- a. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan.
- b. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

- c. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah).
- d. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan yang diselaraskan dengan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dan nasional.
- e. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
- f. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang Tahun 2018–2023, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Pembangunan Daerah Jangka Menengah Tahun 2018-2023

VISI : UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT

MISI	TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan	A	Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan		
	1	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	1	Peningkatan Produktivitas Sektor Perdagangan
			2	Peningkatan Produktivitas Sektor Industri, Koperasi dan UMKM
			3	Peningkatan produktivitas sektor penyediaan akomodasi dan makan minum
			4	Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian
			5	Meningkatkan peluang investasi dan kemitraan global
	2	Meningkatnya Kualitas infrastruktur berkelanjutan	1	Peningkatan kualitas infrastruktur berkelanjutan
2			Peningkatan kualitas lingkungan hidup	

MISI	TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	
	B	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat		
	3	Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan	1	Penanggulangan Kemiskinan terintegrasi
	4	Menurunnya angka Pengangguran	2	Memperluas kesempatan kerja
	5	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	3	Pengembangan Kewirausahaan
Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya saing SDM Masyarakat yang berakhlak dan Berbudaya	C	Meningkatnya Pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul		
	6	Meningkatnya pemerataan kualitas daya saing pendidikan	1	Meningkatkan Budaya Baca
			2	Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan
			3	Standarisasi infrastruktur dan akses pelayanan yang terbuka dan setara
	7	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Peningkatan Kualitas Pelayanan kesehatan
			2	Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan
			3	Peningkatan kualitas infrastruktur olahraga
	D	Terwujudnya Tataan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tentram dan Agamis		
	8	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum
	9	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	2	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
10	Meningkatnya aktifitas keagamaan, adat dan budaya di masyarakat	3	Mendorong Peningkatan aktifitas lembaga keagamaan, adat dan budaya	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif	E	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih		
	11	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Penguatan Sistem Pengendalian Interen
			2	Peningkatan Penyelenggaran Pemerintahan daerah
	12	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani		Penguatan Reformasi Birokrasi

MISI	TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	
	F	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan		
	13	Meningkatnya peran serta kelompok/ lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	1	Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pembangunan
	14	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	2	Mendorong pemberdayaan perempuan

6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Disamping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama seluruh perangkat daerah yang terlibat di dalamnya.

Rumusan arah kebijakan ini berfungsi untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan tujuan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 6. 1
Fokus/Tema Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023



Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang terjadi saat ini dan hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama lima tahun. Berikut adalah arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang periode 2018-2023.

a. Arah Kebijakan Tahun Pertama (2019)

Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2019 memiliki makna strategis mengingat kinerja yang dicapai akan menjadi dasar atau faktor penentu keberhasilan bagi tema-tema pembangunan tahap berikutnya. Pada tahun 2019 menjadi dasar bagi penyelarasan kebijakan pembangunan jangka menengah tahun 2019. Tema pembangunan pada tahun 2019 adalah **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi Dan Penurunan Kemiskinan”**.

Melalui tema di atas, pembangunan Kota Padang Panjang menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat, pembangunan SDM dan peningkatan perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat Kota Padang hidup lebih berkualitas, produktif dan lebih sejahtera.

b. Arah Kebijakan Tahun Kedua (2020)

Arah kebijakan pada tahun 2020 menitik beratkan pada peningkatan perekonomian masyarakat dimana pembangunan Kota

Padang Panjang pada tahun 2020 berfokus pada peningkatan sumberdaya potensi daerah dengan tema “**Meningkatkan Daya Saing Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan**”.

Pada tahun ini pembangunan berfokus pada pembangunan pada sektor perekonomian makro dan mikro. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan daya saing segala potensi daerah untuk mampu berinovasi dan melipat gandakan nilai dan kegunaannya. Sehingga produk produk unggulan daerah mampu bersaing dengan produk dari luar. Sehingga perekonomian daerah dapat menjadi lebih kuat dan tangguh. Pembangunan ekonomi ini diiringi dengan pembangunan lingkungan hidup sebagai bentuk syukur atas dan dalam rangka keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan dimasa depan.

c. Arah Kebijakan Tahun Ketiga (2021)

Arah kebijakan pada tahun 2021, pembangunan di Kota Padang Panjang berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun 2020. Pada tahun 2021 pembangunan Kota Padang Panjang berfokus pada Peningkatan kualitas SDM yang dititik beratkan pada pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan tujuan pembangunan tersebut maka tema pembangunan Kota Padang Panjang pada tahun 2021 adalah “**Terwujudnya Padang Panjang Unggul Melalui Peningkatan Kualitas SDM**”.

Untuk menjawab tema tersebut pada tahun 2021 yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Pada tahun ini diharapkan Padang Panjang meningkatkan kemampuan agar menjadi Kota Padang Panjang unggul.

d. Arah Kebijakan Tahun Keempat (2022)

Arah kebijakan pada tahun 2022, pembangunan Kota Padang Panjang berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 pembangunan Kota Padang Panjang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi yang lebih luas dengan didukung oleh kualitas SDM masyarakat yang berkualitas dan aparatur birokrasi yang handal. Untuk mewujudkan kebijakan pembangunan tersebut maka tema pembangunan Kota Padang Panjang pada tahun 2022 adalah “**Terwujudnya Padang Panjang Sejahtera Melalui Peningkatan Ekonomi, Kualitas SDM**”.

Sesuai tema di atas maka pembangunan daerah dititikberatkan pada pembangunan dalam rangka meningkatkan struktur perekonomian maka peningkatan kualitas dan pemasaran produk industri lokal dibutuhkan inovasi diantaranya pengembangan industri kreatif, penguatan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha dan investasi, pengembangan industri berbasis kawasan, pemotongan rantai distribusi barang dan jasa, penyediaan kebutuhan barang/komoditas dari lokal. Selanjutnya untuk mendukung SDM-nya maka akan dilakukan upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan lapangan kerja. Dengan hal ini, diharapkan potensi-potensi daerah Kota Padang Panjang dapat lebih mandiri dan mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi pembangunan daerah Kota Padang Panjang.

e. Arah Kebijakan Tahun Kelima (2023)

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023, pembangunan Kota Padang Panjang berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 ini, pembangunan Kota Padang Panjang menitikberatkan pada seluruh aspek bidang pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan Kota Padang Panjang pada tahun 2023 adalah **“Terwujudnya Kejayaan Padang Panjang Yang Bermarwah Dan Bermartabat”**.

Berbagai upaya yang akan dilakukan untuk menjadikan Kota Padang Panjang sebagai kabupaten yang sejahtera yaitu penguatan kualitas SDM, peningkatan perekonomian masyarakat makro dan mikro yang kuat sehingga mampu menciptakan peluang investasi yang cepat dan mengurangi pengangguran sehingga pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dan Kota Padang Panjang akan berjaya ditahun akhir periode RPJMD ini.

Berikut ini disajikan keterkaitan strategi pembangunan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang 2018-2023.

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun								
				2019	2020	2021	2022	2023				
MISI 1: Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan												
1	Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	1	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	1	Peningkatan produktivitas sektor perdagangan	1	Peningkatan pengelolaan pasar, pedagang, dan barang beredar	√	√	√	√	√
				2	Peningkatan produktivitas sektor industri, koperasi dan UMKM	1	Penguatan industri kulit, pengolahan susu dan makanan ringan	√	√	√	√	√
						2	Penguatan sektor UMKM	√	√	√	√	√
						3	Meningkatkan peran koperasi syariah dalam pengembangan ekonomi	√	√	√	√	√
				3	Peningkatan produktivitas sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	1	Pengembangan wisata dan kuliner (edu-eco-culture tourism)	√	√	√	√	√
						2	Penyelenggaraan even tahunan Gelar Karya dan Prestasi Warga " Pesona Padang Panjang Kota serambi Makah "	√	√	√	√	√
				4	Peningkatan produktivitas sektor pertanian	1	Peningkatan produksi sub sektor pertanian tanaman pangan dan sentra tanaman hias	√	√	√	√	√
						2	Peningkatan produksi sub sektor peternakan	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
				2019	2020	2021	2022	2023	
		5 Meningkatkan peluang investasi dan kemitraan global	1 Fasilitasi kemudahan investasi dan kemitraan global	√	√	√	√	√	
	2 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	1 Peningkatan kualitas infrastruktur berkelanjutan	1 Pemantapan pembangunan infrastruktur strategis kota yang bersih, indah nyaman untuk mendukung produktifitas ekonomi	√	√	√	√	√	
			2 Pembangunan dengan kesesuaian tata ruang	√	√	√	√	√	
			3 Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	√	√	√	√	√	
		2 Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1 Pengendalian kualitas lingkungan hidup	√	√	√	√	√	
2	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat	3 Menurunnya Angka Kemiskinan	1 Penanggulangan kemiskinan terintegrasi	1 Pembantuan teknis dan modal usaha bagi masyarakat miskin	√	√	√	√	√
			2 Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin	√	√	√	√	√	
	4 Menurunnya angka pengangguran	1 Memperluas kesempatan kerja	1 Membangun kerjasama dengan penyedia lapangan kerja	√	√	√	√	√	
	5 Meningkatnya pendapatan masyarakat	1 Pengembangan kewirausahaan	1 Optimalisasi Gerakan urang mudo (generasi milenial) kreatif berwirausaha dan pengembangan rumah wirausaha	√	√	√	√	√	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun									
				2019	2020	2021	2022	2023					
MISI 2: Meningkatkan Pemerataan kualitas daya saing SDM Masyarakat yang berakhlak dan berbudaya													
3	Meningkatnya Pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul	6	Meningkatnya Pemerataan kualitas daya saing pendidikan	1	Meningkatkan Budaya Baca	1	Gerakan literasi padang panjang bergerak	√	√	√	√	√	
				2	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan	1	Pembangunan daya saing SDM yang unggul dan berkarakter Islami	√	√	√	√	√	
						2	Optimalisasi Wajar 9 Tahun	√	√	√	√	√	
						3	Optimalisasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	√	√	√	√	√	
				3	Standarisasi infrastruktur dan akses pelayanan yang terbuka dan setara	1	Peningkatan standarisasi dan Kualitas Infrastruktur Pendidikan	√	√	√	√	√	
		7	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		1	Peningkatan Kualitas Pelayanan kesehatan	1	Gerakan Padang Panjang Sehat	√	√	√	√	√
						2	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan rujukan	√	√	√	√	√	
						3	Optimalisasi pengendalian penduduk	√	√	√	√	√	
						2	Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan	1	Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana pelayanan kesehatan	√	√	√	√
					3	Peningkatan kualitas infrastruktur olahraga	1	Meningkatkan kualitas sarana prasarana pusat olahraga	√	√	√	√	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun								
				2019	2020	2021	2022	2023				
4	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	8	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1	Meningkatkan Penanganan Pelanggaran Perda	√	√	√	√	√
		9	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitas Sosial	1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pemberdayaan dan Jaminan Sosial	√	√	√	√	√
		10	Meningkatnya aktivitas keagamaan, adat dan budaya di masyarakat	1	Mendorong Peningkatan aktifitas lembaga keagamaan, Adat dan Budaya	1	Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Nilai nilai Agama, adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat melalui gerakan "Gelora Serambi Mekkah"	√	√	√	√	√
						2	Pelestarian Budaya	√	√	√	√	√
MISI 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif												
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	11	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Penguatan Sistem Pengendalian Interen	1	Peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah	√	√	√	√	√
				2		2	Peningkatan Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah	√	√	√	√	√
						3	Penerapan Zona integritas dalam area pelayanan public melalui "Gerakan Kota Anti Korupsi"	√	√	√	√	√
				2	Peningkatan Penyenggaraan Pemerintah daerah	1	Peningkatan capaian kinerja daerah	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun								
				2019	2020	2021	2022	2023				
				2	Peningkatan peran dan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	√	√	√	√	√		
				3	Optimalisasi penataan, penyelamatan dan pelestarian arsip	√	√	√	√	√		
				4	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi "Smart City"	√	√	√	√	√		
				5	Meningkatkan profesionalisme ASN	√	√	√	√	√		
	12	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani	1	Penguatan Reformasi Birokrasi	1	Pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan public yang berstandar ISO	√	√	√	√	√	
				2	Peningkatan Implementasi teknologi dalam pelayanan publik	√	√	√	√	√		
6	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	13	Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan	1	Mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui "SATIMISAKE"	√	√	√	√	√
				2	Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	√	√	√	√	√		
				3	Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	√	√	√	√	√		
	14	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	1	Mendorong pemberdayaan perempuan	1	Peningkatan pemberdayaan gender dalam pembangunan	√	√	√	√	√	

6.3 Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi dan Misi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan berupa program prioritas yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2018-2023. Program-program pembangunan Kota Padang Panjang untuk periode 2018-2023 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing arah kebijakan. Berikut rumusan program pembangunan daerah yang dijabarkan langsung dari visi dan misi Renstra PD dengan tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Kepala Daerah pada Tabel 6.3

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif
Kota Padang Panjang

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
					234,466,047,675		299,872,850,544		325,235,245,519		342,199,829,409		375,070,071,801		1,576,289,409,947		
MISI 1: Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan					71,317,229,000		100,956,810,151		96,484,859,311		105,293,372,747		120,369,013,628		493,866,939,837		
T1	Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,81	5,96	67,734,321,400	6,04	93,511,502,856	6,11	89,517,883,896	6,19	98,093,347,728	6,30	112,967,971,716	6,30	461,825,027,596		
SI	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	2,79	3,05	11,532,498,100	3,17	22,516,588,706	3,3	22,284,011,038	3,43	22,147,237,273	3,56	23,611,548,688	3,56	102,091,883,805		
		Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran	4,57	5,02		5,24		5,47		5,69		5,92		5,92			
		Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor industri	2,19	2,28		2,33		2,37		2,42		2,46		2,46			
		Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,48	7,61		7,67		7,73		7,80		7,86		7,86			
	1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	Persentase pasar ber-SNI dan tertib ukur	0	15,00%	197,545,000	30,00%	6,369,007,096	50,00%	6,948,342,242	75,00%	6,278,776,693	100,00%	8,112,941,093	100,00%	27,906,612,124	Dinas Koperasi, Perdagangan, UKM
	2	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Peningkatan produktifitas IKM	5%	5%	1,343,544,000	10,00%	1,346,070,000	15,00%	1,316,070,000	20,00%	1,366,070,000	25%	1,366,070,000	35%	6,737,824,000	Diperindag UMKM
	3	Program Pengembangan sistim pendukung usaha bagi Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang naik kelas	30 Usaha Mikro	70 Usaha Mikro	467,000,000	120 UM	525,000,000	180 UM	350,000,000	250 UM	400,000,000	330 UM	350,000,000	330 UM	2,092,000,000	Diperindag UMKM
	4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif berpola syariah	31,3%	37,50%	734,340,000	43,75%	1,058,400,000	62,25%	1,042,770,000	81,25%	934,158,500	89,58%	966,616,425	89,58%	4,736,284,925	Diperindag UMKM
	5	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	3 objek	4 objek	2,664,316,000	5 objek	3,261,598,750	6 objek	3,083,324,340	7 objek	3,746,451,837	7 objek	3,311,777,229	7 objek	16,067,468,156	Dinas Pariwisata
	6	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata	25%	33,00%	2,385,225,000	50,00%	3,537,195,000	67,00%	3,541,002,600	83,00%	3,256,847,800	100,00%	3,542,195,000	100,00%	16,262,465,400	Dinas Pariwisata

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Angka Kecukupan Energi (% AKE)	97.83%	100%	882,304,800	100%	688,000,000	100%	717,500,000	100%	650,850,000	100%	658,685,000	100%	3,597,339,800	Dinas Pangan Pertanian
		Persentase Angka Kecukupan Protein (% AKP)	104.04%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
8	Program Peningkatan Produksi pertanian / perkebunan	Produksi Tanaman Hias	71,548	73,847	-	76,062	3,013,414,400	79,105	2,540,382,192	83,060	2,988,793,213	87,213	2,678,946,839	87,213	11,221,536,644	Dinas Pangan Pertanian
		Produktivitas Padi	6,42 ton/ha	5,7 ton/ha		5,8 ton/ha		6,2 ton/ha		6,3 ton/ha		6,4 ton/ha		6,4 ton/ha		
		Luas Lahan Pertanian Organik	9.7 ha	9.7 ha		10.7 ha		11.7 ha		12.7 ha		12.7 ha		12.7 ha		
9	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan	720.64	650.00	590,609,000	680.00	614,195,360	700.00	641,082,374	720.00	670,405,669	750.00	703,421,896	750	3,219,714,300	Dinas Pangan Pertanian
10	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan/ Produk Peternakan	4%	5%	1,973,464,300	6%	1,588,708,100	7%	1,468,537,290	8%	1,239,883,561	9%	1,255,895,205	9%	7,526,488,456	Dinas Pangan Pertanian
11	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor yang terdaftar	2 investor	18 investor	294,150,000	20 investor	515,000,000	23 investor	635,000,000	25 investor	615,000,000	28 investor	665,000,000	114 investor	2,724,150,000	Dinas PMPTSP
S2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	Persentase kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	na	0.50	56,201,823,300	0.75	70,994,914,150	1.00	67,233,872,858	1.25	75,946,110,455	1.50	89,356,423,028	1.50	359,733,143,791	
		IKLH	66.17	65.25-66.57		65.52-66.84		65.79-67.14		66.09-67.38		66.33-67.65		66.33-67.65		
1	Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana publik	Persentase Ketersediaan Sarana publik	0	20%	11,811,680,000	40%	3,600,000,000	70%	15,400,000,000	88%	23,220,660,680	100%	23,021,934,062	100%	77,054,274,742	DINAS PUPR
2	Program pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar	Persentase trotoar jalur utama yang ramah disabilitas	0	17%	3,729,975,000	33%	2,800,000,000	50%	2,800,000,000	83%	2,758,520,000	100%	2,800,000,000	100%	14,888,495,000	DINAS PUPR
3	Program Pembangunan/ Rehabilitasi jalan dan Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi baik	88.41%	90.50%	10,119,550,000	91.50%	11,190,815,250	92.50%	12,830,098,513	93.50%	11,961,908,438	94.50%	22,717,341,673	94.50%	68,819,713,873	DINAS PUPR
4	Program Penerangan jalan Umum	Persentase Penerangan Jalan Umum (Pemasangan PJU setiap 50 m dibagi panjang jalan lingkungan dan jalan kota)	61.64%	71%	2,373,749,600	75%	4,065,000,000	80%	5,404,950,000	85%	5,388,945,000	90%	4,991,761,757	90%	22,224,406,357	DINAS PUPR
5	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase perlengkapan Fasilitas Keselamatan yang berkualitas	80.15%	80.40%	598,750,000	81.98%	1,064,020,000	83.03%	2,931,520,000	83.73%	1,774,020,000	84.78%	2,161,520,000	84.78%	8,529,830,000	Dinas Perhubungan
6	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase RTH Publik	2.46%	2.6%	4,490,007,550	2.7%	22,605,000,000	2.8%	4,518,000,000	2.9%	3,737,400,000	3.0%	13,455,555,681	3.0%	48,805,963,231	DINAS PUPR

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD									
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
7	Program Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio Bangunan BerIMB per Satuan bangunan	0.762	0.766	728,098,800	0.767	7,698,650,000	0.768	6,346,716,147	0.769	10,727,877,484	0.770	3,651,783,060	29,153,125,491	DINAS PUPR							
8	Program Pencegahan Dini dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Kelurahan Tangguh Bencana	0	2	kelurahan	1,756,381,000	8	kelurahan	394,380,500	12	kelurahan	428,318,550	14	kelurahan	412,000,000	16	kelurahan	400,000,000	16	kelurahan	3,391,080,050	BPBD Kesbangpol
9	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	80%	80%	7,836,171,350	75%	10,160,621,350	74%	9,123,524,260	73%	8,486,620,714	72%	8,597,715,899	72%	44,204,653,573	Dinas Perkim LH						
10	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam	Jumlah penghargaan di bidang lingkungan hidup	2 Jenis Penghargaan	2 Jenis Penghargaan	1,076,520,000	2 Jenis Penghargaan	1,051,411,625	2 Jenis Penghargaan	1,066,310,912	2 Jenis Penghargaan	1,081,429,328	3 Jenis Penghargaan	1,096,770,140	3 Jenis Penghargaan	5,372,442,004	Dinas Perkim LH						
11	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar sedang	36,84%	45-43%	1,110,975,000	43-41%	1,341,347,925	41-39%	1,294,421,102	39-37%	1,339,552,267	37-35%	1,386,842,886	37-35%	6,473,139,180	Dinas Perkim LH						
12	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman	PSU kawasan permukiman yang sesuai standar	79%	81%	10,569,965,000	84%	5,023,667,500	86%	5,090,013,375	88%	5,057,176,544	91%	5,075,197,871	91%	30,816,020,290	Dinas Perkim LH						
T2	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat	PDRB Perkapita	44.12	48.19	3,582,907,600	50.42	7,445,307,295	52.80	6,966,975,415	55.34	7,200,025,019	58.05	7,401,041,912	58.05	32,041,912,240							
S3	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan	Angka Kemiskinan	6.17	5.45	2,820,095,300	5.03	5,972,835,000	4.6	5,677,428,750	4.18	5,782,252,188	3.75	5,887,316,797	3.75	26,139,928,034							
		Indeks Gini	0.30	0.28		0.27		0.26		0.25		0.24		0.24								
1	Program Kewirausahaan Bagi Masyarakat Miskin	Persentase Masyarakat Miskin yang bergerak disektor UMKM menerima bantuan Kewirausahaan yang digunakan untuk usaha	29%	43%	1,469,950,000	57%	1,700,000,000	71%	1,700,000,000	85%	1,700,000,000	100%	1,700,000,000	100%	8,269,950,000	Diperindag UMKM						
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin berbasis Pertanian	Persentase Masyarakat Miskin yang bergerak disektor pertanian menerima Bantuan Pertanian	18.00%	35.00%	457,395,300.00	47.00%	500,110,000.00	65.00%	500,110,000.00	82.00%	500,110,000.00	90.00%	500,110,000.00	90.00%	2,457,835,300	Dinas Pangan Pertanian						
3	Program Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman	Rasio Rumah layak Huni	92.65%	93.54%	892,750,000	94.43%	1,872,725,000	95.32%	1,477,318,750	96.21%	1,482,142,188	97.10%	1,487,206,797	97.10%	7,212,142,734	Dinas Perkim LH						

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4	Program Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin dan Berprestasi	Persentase Siswa miskin yang memperoleh biaya pendidikan	11.60%	11,8%	-	11,8%	1,900,000,000	11,8%	2,000,000,000	11,8%	2,100,000,000	11,8%	2,200,000,000	11,8%	8,200,000,000	Disdikpora
		Persentase Siswa berprestasi yang memperoleh beasiswa Perguruan Tinggi Luar Negeri	NA	NA	26		52		78		78		78			
S4	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.43	4.84	133,467,500	4.72	505,597,500	4.59	354,500,000	4.47	450,725,000	4.34	513,472,500	4.34	1,957,762,500	
1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah penambahan kesempatan kerja	481	494	133,467,500	507	505,597,500	520	354,500,000	535	450,725,000	551	513,472,500	2607	1,957,762,500	DPMPPTSP
S5	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat)	10.24	10.29	629,344,800	10.31	966,874,795	10.34	935,046,665	10.36	967,047,831	10.39	1,000,252,615	10.39	3,944,221,706	
1	Program Pengembangan Rumah Wirausaha	Persentase Cakupan Bina UMKM	1.64%	1.64%	554,345,000	2.01%	760,000,000	2.38%	775,000,000	2.76%	805,000,000	3.13%	830,000,000	3.13%	3,170,000,000	Diperindag UMKM
2	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase cakupan Pembinaan Kelembagaan Pertanian dan Perikanan	45.45%	56.06%	74,999,800	66.67%	206,874,795	76.77%	160,046,665	88.89%	162,047,831	100.00%	170,252,615	100.00%	774,221,706	Dinas Pangan Pertanian
MISI 2: Meningkatkan Pemerataan kualitas daya saing SDM Masyarakat yang berakhlak dan berbudaya						136,589,964,500		158,329,101,199		184,535,741,960		189,726,449,129		203,906,250,776		873,087,217,565
T3	Meningkatnya Pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,01	78,25	119,875,292,000	78,86	142,346,851,199	79,48	166,608,006,760	80,10	172,397,108,704	80,72	185,245,160,913	80,72	786,472,419,576	
S6	Meningkatnya Pemerataan kualitas daya saing pendidikan	Rata-rata lama sekolah	11,43	11,88	32,496,753,500	12,11	45,012,173,836	12,33	46,980,730,189	12,56	52,558,243,268	12,78	80,210,060,468	12,78	257,257,961,260	
		Harapan Lama Sekolah	15,03	15,27		15,38		15,50		15,62		15,74		15,74		
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan / jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun	21,965	23,400	2,493,971,000	25,200	3,365,875,000	27,000	4,157,818,750	28,800	11,408,554,688	30,600	40,543,270,847	30,600	61,969,490,284	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	Program Padang Panjang Juara	Prestasi Pendidik/ Tenaga Kependidikan/ Peserta Didik di tingkat Provinsi dan nasional	15 prestasi Tk provinsi	17 prestasi Tk provinsi	855,800,000	20 Prestasi TK Provinsi, 1 nasional	2,739,945,250	23 Prestasi TK provinsi, 1 nasional	3,025,884,873	26 Prestasi TK provinsi, 1 nasional	3,405,188,875	30 Prestasi TK provinsi, 1 nasional	4,157,676,284	30 Prestasi TK provinsi, 1 nasional	14,184,495,281	Disdikpora
		Rasio sekolah yang melaksanakan pembinaan Imtaq dan Program Tahfidz secara terpadu terhadap seluruh sekolah	10%	60%		70%		80%	-	90%	-	100%	-	100%	0	

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP / MTs	99,8%	100%	2,062,488,500	100%	3,447,156,536	100%	3,393,613,884	100%	3,440,768,093	100%	3,488,629,614	100%	15,832,656,627	Disdikpora
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,8%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	APK SD/MI/Paket A	109%	108.91	21,219,658,000	110.91	13,966,942,000	112.91	14,181,545,280	114.91	14,359,484,971	116.91	14,587,715,377	116.91	78,315,345,628	Disdikpora
		APM SD/MI/Paket A	96.72%	96.80%		97.67%		98.54%		99.41%		100%		100%		
		APK SMP/MTs/Paket B	101.18%	102.90%		103.57%		104.23%		104.90%		105.57%		105.57%		
		APM SMP/MTs/Paket B	82.05%	82.07%		83.07%		84.07%		85.07%		86.07%		86.07%		
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD (4-6 tahun)	92.54%	95.00%	4,698,175,000	100%	6,723,992,500	100%	6,391,091,750	100%	6,542,900,925	100%	6,799,891,018	100%	31,156,051,193	Disdikpora
		Rasio Lembaga PAUD Terakreditasi (diatas 1 Tahun)	46.55%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		
		Rasio PAUD yang terintegrasi Posyandu dan BKB		40%		50%		60%		70%		80%		80%		
6	Program Pendidikan Non Formal	Angka Kelulusan Pendidikan Paket A/B/C	90%	90%	1,166,661,000	92%	1,622,684,550	94%	1,762,547,378	96%	1,924,497,066	100%	2,112,656,704	100%	8,589,046,698	Disdikpora
		Persentase penduduk usia 15 tahun keatas tamat SLTA/ sederajat		70%		72%		74%		76%		80%		80%		
7	Program Peningkatan Standarisasi Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Rasio SD/TK yang sudah memenuhi kelengkapan standar sarana prasarana	58%	60%		70%	13,145,578,000	80%	14,068,228,274	90%	11,476,848,651	100%	8,520,220,625	100%	47,210,875,550	Disdikpora
		Rasio SMP/MTs yang sudah memenuhi kelengkapan standar sarana prasarana	58%	65.65%		70.00%		77%		84%		90%		90%		
		Sekolah pendidikan SD/TK kondisi bangunan baik	58%	60%		70%		80%		90%		100%		100%		
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	90%	92%		94%		96%		96%		96%		96%		
S7	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (AHH)	72,46	72,47	87,378,538,500	72,47	97,334,677,363	72,48	119,627,276,572	72,48	119,838,865,436	72,49	105,035,100,445	72,49	529,214,458,315	
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Keluarga Sehat	25%	35%	15,420,484,500	45%	5,753,275,800	55%	5,092,103,634	75%	6,070,320,996	85%	6,243,453,754	85%	38,579,638,684	Dinas Kesehatan
		Persentase masyarakat miskin yang memperoleh jaminan kesehatan	94.89	96.25		97.17		98.09		99.01		100.00		100.00		

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	Program Pembekalan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi Kurang	5.74%	5.60%	198,074,000	5.00%	322,161,250	4.60%	350,122,375	4.30%	387,867,113	3.00%	426,653,824	3.00%	1,684,878,562	Dinas Kesehatan
3	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Rumah tangga yang Ber PHBS	44%	44%	729,200,000	50%	1,090,815,000	55%	1,094,005,000	60%	1,097,514,000	65%	1,101,404,000	70%	5,112,938,000	Dinas Kesehatan
4	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Persentase UCI	81.35%	90.00%	303,523,000	91.00%	552,227,300	92.25%	570,345,640	96.25%	589,578,290	100%	609,457,338	100%	2,625,131,568	Dinas Kesehatan
5	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Cakupan Pembinaan Olahraga	27 cabang	28 cabang	1,474,420,000	31 cabang	1,305,000,000	34 cabang	1,500,250,000	36 cabang	11,499,000,000	36 cabang	1,450,000,000	36 cabang	17,228,670,000	Disdikpora
		Penyelenggaraan Event Olahraga	4 Event Lokal	7 Event Lokal, 1 Event Prov		7 Event Lokal, 2 Event Prov		8 Event Lokal, 2 Event Prov		8 Event Lokal, 2 Event Prov, 1 Event Nasional		8 Event Lokal, 2 Event Prov, 1 Event Nasional		8 Event Lokal, 2 Event Prov, 1 Event Nasional		
6	Program peningkatan mutu layanan kesehatan Rumah Sakit (BLUD)	Persentase pemenuhan jenis pelayanan sesuai standar	81.00%	85.00%	52,000,000,000	90%	52,000,000,000	90%	52,000,000,000	95%	52,000,000,000	100%	52,000,000,000	95%	260,000,000,000	RSUD
7	Program pelayanan Kesehatan	Tingkat kepuasan pelayanan kesehatan	80.00%	81.00%	0	82.00%	11,946,918,363	83%	12,291,566,290	84%	12,567,357,223	85%	12,851,917,324	85%	49,657,759,200	Dinas Kesehatan
8	Program pengendalian penduduk dan KB	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	58.00%	58.99	2,601,887,000	60.02	2,993,532,150	60.91	3,149,598,758	61.68	3,298,978,695	62.35	3,537,677,630	62.35	15,581,674,233	DSPPKBP3A
		Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	37.50%	41.67%		45.83%		50%		54.17%		58.33%				
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan RIPP	NA	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
9	Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit	Persentase kelengkapan sarana RSUD sesuai dengan standar yang dibutuhkan	69.57%	69.57%	13,495,950,000	78.26%	14,170,747,500	79.57%	14,879,284,875	85.22%	15,623,249,119	86.96%	26,404,411,575	86.96%	84,573,643,068	RSUD
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase tersedianya pusat kegiatan olah raga (Sport Centre)	0.00%	10.00%	1,155,000,000	25.00%	7,200,000,000	50.00%	28,700,000,000	100.00%	16,705,000,000	100.00%	410,125,000	100.00%	54,170,125,000	DISDIKORA
T4	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban umum	95.16	96.37	16,714,672,500	97.28	15,982,250,000	98.19	17,927,735,200	99.09	17,329,340,425	100.00	18,661,089,864	100.00	86,614,797,989	
SB	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	95.16	96.37	4,558,679,000	97.28	3,655,520,000	98.19	3,575,520,000	99.09	3,580,520,000	100.00	3,665,520,000	100.00	19,035,469,000	

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	1	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditangani	95%	97%	4,558,679,000	99%	3,655,520,000	100%	3,575,520,000	100%	3,580,520,000	100%	3,665,520,000	98%	19,035,469,000	Satpol PP Damkar
S9	Menurunnya Penyanggand Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan jumlah PMKS	2.94	2.34	1,605,048,500	2.04	2,398,000,000	1.43	2,304,800,000	1.73	2,380,950,000	1.13	2,290,247,000	1.13	10,979,045,500		
	1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyanggand Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan Rumah Tangga miskin	1.6%	2%	608,583,500	2.5%	837,000,000	3.0%	873,250,000	3.5%	902,950,000	4%	943,097,000	4%	4,164,880,500	Dinas Sosial PPKBPPPA
	2	Program pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan sosial	Persentase lansia yang tertangani,	29.15%	100%	996,465,000	100%	1,561,000,000	100%	1,431,550,000	100%	1,478,000,000	100%	1,347,150,000	100%	6,814,165,000	Dinas Sosial PPKBPPPA
			persentase penyandang disabilitas yang tertangani,	25.93%	100%		100%		100%		100%		100%	100%			
			persentase korban bencana yang tertangani,	100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%			
			persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan,	100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%			
			persentase penanganan gelandangan, PSKS dan korban penyalahgunaan NAPZA	35%	40%		45%		50%		55%		60%	60%			
S10	Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat	Persentase aktivitas Kegiatan keagamaan dimesjid	20.39	38.82	10,550,945,000	56.58	9,928,730,000	74.34	12,047,415,200	90.79	11,367,870,425	100.00	12,705,322,864	100.00	56,600,283,489		
	1	Program Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Budaya dan keagamaan	Peringkat prestasi kafilah MTQ di tingkat provinsi	9	9	9,360,475,000	-	8,668,730,000	8	10,771,415,200	-	9,924,270,425	7	11,192,362,864	100%	49,917,253,489	Bagian Kesra Setdako
			Jumlah sekolah yang mendapat peringkat LSS tingkat provinsi	1	1		2		3		4%		5	5			
	2	Program Pemajuan Kebudayaan	Persentase Capaian Objek Pemajuan Kebudayaan (10 Objek)	NA	2 Objek (Seni, Pengetahuan Tradisional)	1,190,470,000	4 Objek (+ Adat Istiadat, Permainan Rakyat)	1,260,000,000	6 Objek (+ Tradisi Lisan, Teknologi Tradisional)	1,276,000,000	8 Objek (+ Bahasa, Olahraga Tradisional)	1,443,600,000	10 Objek (+ Ritus, Manuskrip)	1,512,960,000	10 Objek (+ Ritus, Manuskrip)	6,683,030,000	Disdikpora
MISI 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif					26,558,854,175		40,586,939,194		44,214,644,248		47,180,007,533		50,794,807,397		209,335,252,546		
T5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	54,94	62.00	18,668,455,775	64.00	16,377,878,869	66.00	17,317,743,057	68.00	15,955,435,682	70.00	16,831,643,704	70.00	85,151,157,086		

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
S11	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah	CC (58)	B (60,1)	16,940,217,275	B (65)	14,164,841,819	BB (70,1)	14,170,809,404	BB (75)	13,302,151,384	A (80,02)	13,695,925,134	A (80,02)	72,273,945,016		
		Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			
	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	72.00%	80.00%	973,411,700	83.00%	897,100,000	85.00%	1,141,205,000	85.00%	937,415,250	85.00%	1,225,736,013	85.00%	5,174,867,963	BAPPEDA
	2	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	58%	70.00%	1,515,900,000	75.00%	765,000,000	80.00%	755,000,000	85.00%	900,000,000	90.00%	575,000,000	90.00%	4,510,900,000	BAPPEDA
	3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Level Maturitas SPIP	LEVEL 2	LEVEL 3 (3.00)	965,260,000	LEVEL 3 (3.10)	479,500,000	LEVEL 3 (3.30)	537,000,000	LEVEL 3 (3.50)	593,000,000	LEVEL 3 (3.70)	645,000,000	LEVEL 3 (3.70)	3,219,760,000	Inspektorat Kota
	4	Program Pelaksanaan Peningkatan Zona Integritas dan Pengendalian Gratifikasi	Indeks integritas (1-10)	NA	0	0	2	530,000,000	4	650,000,000	5	700,000,000	6	750,000,000	6	2,630,000,000	Inspektorat Kota
	5	Program Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah	jumlah OPD dengan nilai SAKIP ≥ 50	7	8	243,346,250	10	144,000,000	12	144,000,000	14	144,000,000	16	144,000,000	16	819,346,250	Bag Organisasi
	6	Program Peningkatan dan Pengelolaan Penganggaran dan perbendaharaan daerah	Penyusunan APBD yang tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	1,503,190,000	Tepat waktu	1,264,477,200	Tepat waktu	1,517,372,640	Tepat waktu	1,791,454,080	Tepat waktu	2,086,504,896	Tepat waktu	8,162,998,816	BPKD
	7	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pelaporan penyajian data Barang Milik Daerah yang tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	273,568,000	Tepat waktu	308,373,600	Tepat waktu	370,048,320	Tepat waktu	444,057,984	Tepat waktu	532,869,581	Tepat waktu	1,928,917,485	BPKD
	8	Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip daerah	Persentase kenaikan arsip statis	4.2%	7.70%	422,897,000	11.00%	675,000,000	11.60%	860,000,000	12.10%	730,000,000	12.90%	423,000,000	13%	3,110,897,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	9	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas informasi publik	NA	2.6%	2,388,755,325	2.65%	2,848,031,019	2.7%	2,909,823,444	2.85%	2,742,369,070	3%	2,783,114,645	3%	13,672,093,503	Dinas Kominfo
	10	Program e-Government	Persentase implementasi e-government	NA	64.0%	7,990,214,000	73.00%	5,743,360,000	82.0%	4,776,360,000	91.00%	3,809,855,000	100%	4,020,700,000	100%	26,340,489,000	Dinas Kominfo
	11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat teknis, bimtek dan sosialisasi pertahanan	NA	7%	663,675,000	8%	510,000,000	9%	510,000,000	10%	510,000,000	11%	510,000,000	11%	2,703,675,000	BKPSDM

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
S12	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,64 (Baik)	78 (Baik)	1,728,238,500	79 (Baik)	2,213,037,050	80 (Baik)	3,146,933,653	81 (Baik)	2,653,284,298	82 (Baik)	3,135,718,569	82 (Baik)	12,877,212,070	
	1 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen adminduk	80%	85%	1,059,569,000	88%	1,333,089,550	92%	1,563,744,028	96%	1,453,866,229	98%	1,720,887,790	98%	7,131,156,597	Dinas Duk Capil
	2 Program Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai rata-rata kualitas pelayanan publik	na	3,25%	438,730,000	3,3%	404,947,500	3,35%	458,189,625	3,4%	519,418,069	3,45%	589,830,779	3,45%	2,411,115,973	Bag Organisasi
	3 Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	100%	100%	38,939,500	100%	30,000,000	100%	530,000,000	100%	200,000,000	100%	230,000,000	100%	1,028,939,500	DPMPPTSP
	4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Persentase keakuratan data	99,65	99,75%	191,000,000	99,85%	445,000,000	99,90%	595,000,000	99,95%	480,000,000	99,98%	595,000,000	99,98%	2,306,000,000	Dinas Duk Capil
T6	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	% partisipasi masyarakat dalam pembangunan	2,29	2,30	7,890,398,400	2,31	24,209,060,325	2,32	26,896,901,191	2,33	31,224,571,851	2,34	33,963,163,693	2,34	124,184,095,460	
S13	Meningkatnya peran serta kelompok /lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	% lembaga kemasyarakatan yang aktif	n/a	70	7,546,494,400	75	23,924,060,325	80	26,586,901,191	85	30,889,571,851	90	33,603,163,693	90	122,550,191,460	
	1 Program Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan	Persentase Nilai Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	16%	18%	3,902,350,400	19%	20,843,955,325	20%	23,361,696,191	21%	27,610,866,851	22%	30,227,108,693	22%	105,945,977,460	Kecamatan
	2 Program peningkatan kelembagaan masyarakat	Persentase LPM Aktif	15,79%	26,32	2,186,607,000	36,84%	1,532,000,000	47,37%	1,542,000,000	63,16%	1,552,000,000	73,68%	1,562,000,000	73,68%	8,374,607,000	Dinas Sosial PPKBPPA
		Persentase PKK Aktif	15,79%	26,32		36,84%		47,37%		63,16%		73,68%	73,68%			
		Swadaya masyarakat terhadap program		0,04%		4,50%		5,00%		5,50%		6,00%	6,00%			
		Persentase swadaya masyarakat terhadap	4%	4,5%		5,00%		5,5%		6,00%		6,00%	6,00%			
		Persentase lembaga adat yang Aktif	37,50%	50%		62,50		75,00		87,50		100,00	100,00			
	3 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	40%	60%	1,116,012,000	65%	1,250,000,000	70%	1,335,000,000	75%	1,423,500,000	80%	1,465,850,000	80%	6,590,362,000	Disdikpora
	4 Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase Forum Anak yang Aktif	5,26%	15,79%	341,525,000	26,32%	298,105,000	36,84%	348,205,000	47,37%	303,205,000	57,89%	348,205,000	57,89%	1,639,245,000	Dinas Sosial PPKBPPA
		Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	na	63,00%		63,00%		65,00%		70,00%		73,00%	73,00%			

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM			INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
S14	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	76.10	77.50	343,904,000	78.90	285,000,000	80.30	310,000,000	81.70	335,000,000	83.10	360,000,000	83.10	1,633,904,000		
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase ARG terhadap APBD	8.84%	9.00%	343,904,000	9.50%	285,000,000	10.00%	310,000,000	10.50%	335,000,000	11.00%	360,000,000	11.00%	1,633,904,000	Dinas Sosial PPKBPPPA	
		Persentase organisasi perempuan yang aktif	66,67%	68.00%		70.00%		73.00%		75.00%		78.00%		78.00%			